



## PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CORPORATE GOVERNANCE, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2017-2021)

**Astrid Dini Aliyani, Paulus Theodorus Basuki Hadiprajitno<sup>1</sup>**

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

### ABSTRACT

*This study examines the relationship between corporate social responsibility, corporate governance, and firm characteristics with the level of tax avoidance in manufacturing companies. This study uses tax avoidance as the dependent variable and corporate social responsibility, corporate governance, and firm characteristic (capital intensity) as independent variables. Also, leverage, profitability, and firm size as control variables. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2017-2021. Using purposive sampling, 85 samples were obtained for 5 consecutive years. This study uses multiple linear regression analysis to test the hypothesis. The finding from this study proves that corporate social responsibility and corporate governance have a significant negative relationship to the extent of tax avoidance. While capital intensity has no significant relationship to the extent of tax avoidance.*

*Keywords: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Capital Intensity.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merujuk pada proses pembaruan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai suatu kondisi yang dianggap lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pohan, 2016). Pembangunan di Indonesia dilakukan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat terlaksana dengan sokongan dana besar yang salah satunya berasal dari pajak. Pengertian tersebut didukung oleh salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* atau anggaran yang menjelaskan bahwa pajak yang terkumpul dalam kas negara dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan negara termasuk rencana pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Ginting & Irawan, 2022).

Pajak mempunyai peran besar dan signifikan dalam pembangunan negara. Hal tersebut didasarkan pada porsi pajak dalam penerimaan negara. Menurut data BPS pada *website* resminya, selama 5 tahun terakhir penerimaan pajak berkontribusi rata-rata sebesar 79% dari total keseluruhan penerimaan negara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Untuk mendukung pemungutan pajak, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam memungut pajak. Sistem ini diyakini dapat mempermudah serta memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak dalam memperhitungkan, menyetor, sekaligus melakukan pelaporan pajaknya sesuai dengan jumlah seharusnya yang wajib dibayarkan. Bertentangan dengan kepentingan negara, penerapan sistem tersebut seolah memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalisir, memanipulasi, ataupun merencanakan strategi perpajakan yang seharusnya mereka bayarkan (Maraya & Yendrawati, 2016). Hal tersebut mengacu pada asumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban yang menekan total laba perusahaan yang mana bertentangan dengan tujuannya yaitu memaksimalkan laba. Sehingga perusahaan merencanakan strategi dalam rangka meminimalkan utang pajaknya yang dikenal dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak mengacu pada istilah *tax avoidance* yang dilakukan melalui pemanfaatan *grey area* dan tidak bertentangan dengan undang-undang. *Tax avoidance* dilakukan

---

<sup>1</sup> Corresponding author



perusahaan untuk mengupayakan peningkatan profitabilitas maupun arus kas perusahaan. Hal tersebut karena semakin kecil pajak yang dibayarkan akan memperbesar jumlah pendapatan setelah pajak (Septiani & Muid, 2019). Jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan berbanding lurus dengan jumlah pendapatan, sehingga perusahaan berupaya meminimalisir beban pajaknya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Itu berarti bahwa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu indikator dalam mengukur adanya *tax avoidance* adalah dengan mempertimbangkan *tax ratio* atau rasio pajak. Rasio ini merujuk pada persentase antara penerimaan pajak dibagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan salah satu instrumen pengukur kinerja pemungutan pajak (Kurniawan et al., 2020). rasio pajak ini masih dibawah standar *tax ratio* yang terlebih dahulu ditentukan oleh *World Bank* pada angka 15%. Rendahnya *tax ratio* ini mengindikasikan masih adanya praktik *tax avoidance* di Indonesia (Deasvery Falbo et al., 2018; Kurniawan et al., 2020). Praktik ini mengakibatkan rendahnya pendapatan negara dan mengakibatkan kerugian. *The State of Tax Justice 2021* menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 2,28 miliar atau setara Rp 33,7 triliun. Dari angka tersebut, US\$ 2,22 miliar atau setara dengan Rp 32,9 triliun yang hampir keseluruhannya merupakan bagian dari penghindaran pajak perusahaan.

Maraknya tindakan *tax avoidance* mengakibatkan setiap langkah yang diambil perusahaan selalu dijadikan pusat perhatian publik. Oleh karena itu, perusahaan berlomba-lomba untuk menampilkan upaya terbaik dalam meningkatkan citra positifnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah satu dari banyaknya cara yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan citra positif melalui kegiatan yang berdampak pada lingkungan dan sosial serta menumbuhkan kepercayaan terhadap perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan dukungan baik dari lingkungan maupun masyarakat agar dapat *going concern*. Jika suatu perusahaan memiliki komitmen CSR yang baik maka kemungkinan dilakukannya tindakan *tax avoidance* akan lebih kecil, begitu pula sebaliknya.

Di samping keputusan perusahaan dalam kegiatan CSR, sejatinya semua keputusan dibuat oleh direksi termasuk keputusan untuk melakukan *tax avoidance* (Desai & Dharmapala, 2006). Direksi sebagai pengelola perusahaan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terbaik sesuai dengan kondisi perusahaan. Namun, adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara pemilik dan pengelola perusahaan (*information asymmetry*) mengakibatkan benturan kepentingan. Pemilik perusahaan tidak menginginkan adanya praktik *tax avoidance* karena tindakan tersebut dinilai berisiko, sedangkan direksi menginginkan hal yang sebaliknya (Setyawan, 2021). Untuk mengendalikan kinerja direksi, perlu dibentuk dan diterapkan tata kelola perusahaan yang selanjutnya disebut *corporate governance* (CG). Penerapan bentuk pengendalian tersebut dianggap mampu meminimalisir *tax avoidance*.

Keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba yang menjadi tujuan perusahaan. Dalam upaya memaksimalkan laba, ada banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan salah satunya adalah dengan memanfaatkan *deductible expense* atau beban pengurang. *Deductible expense* merupakan beban-beban yang diasumsikan dapat meminimalkan penghasilan bruto sebagaimana diatur pada pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Salah satu *deductible expense* yang dapat dimanfaatkan perusahaan adalah biaya penyusutan atau biasa dikenal dengan istilah beban depresiasi atas pengeluaran untuk perolehan *tangible assets* dalam hal ini adalah aset tetap (*fixed asset*). Besaran jumlah modal perusahaan dalam bentuk aset tetap dikenal dengan istilah *capital intensity* (intensitas modal). *Capital intensity* termasuk ke dalam salah satu karakteristik perusahaan yang merupakan faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan didefinisikan sebagai ciri khas maupun karakter yang melekat serta dapat diamati dari intensitas modal (*capital intensity*), tingkat likuiditas (*leverage*), ukuran perusahaan (*size*), profitabilitas, keputusan investasi, dan lain sebagainya (Kartana & Wulandari, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, *corporate governance*, dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Legitimasi

*Legitimacy theory* menjelaskan bagaimana hubungan tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap reaksi lingkungan sosial (masyarakat). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan mencoba memastikan bahwasanya setiap tindakan yang diputuskan telah sejalan dengan norma dan nilai yang dipercaya oleh masyarakat sekitar (Deegan et al., 2002). Teori ini berpendapat bahwasanya perusahaan akan selalu berusaha memastikan kegiatannya memenuhi standar masyarakat di mana mereka beroperasi serta membuat kode etik mekanisme yang tepat untuk melegitimasi tindakan yang dilakukan perusahaan (Abdelmoula et al., 2022). Legitimasi yang diperoleh baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah, maupun masyarakat dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya (Hidayati & Murni, 2009). Hal tersebut didasarkan pada konsep kontrak sosial yang dijelaskan oleh Ghozali & Chariri (2007) bahwa perusahaan terikat kontrak sosial dengan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan operasional dan memanfaatkan sumber daya ekonominya.

### **Teori Agensi**

*Agency theory* menjelaskan bagaimana relasi atau kontrak antara satu pihak dan pihak lain. Pihak-pihak tersebut adalah antara prinsipal dan agen. Perjanjian atau kontrak yang terjadi ditujukan agar agen dapat bertindak atas nama prinsipal berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menyatakan bahwa terjadi pendelegasian kekuasaan dari prinsipal (pemilik perusahaan) kepada agen (pengelola perusahaan) berupa kewenangan pengambilan keputusan tertentu. Hal tersebut mengindikasikan adanya pemisahan antara prinsipal dan agen yang diketahui sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*). Oleh karena itu, agen bertanggungjawab untuk melaporkan semua keputusan dan tindakan yang dilakukan kepada prinsipal. Hubungan keagenan dihubungkan dengan dasar masalah keagenan (*agency problems*) yang diakibatkan adanya perbedaan tujuan dan kepentingan yang dimiliki prinsipal maupun agen. Direksi sebagai agen memiliki lebih banyak pengetahuan dan kendali atas operasional perusahaan daripada prinsipal yang selanjutnya disebut asimetri informasi (*asymmetric information*). Perbedaan informasi tersebut mengakibatkan direksi sebagai agen lebih mengetahui kondisi perusahaan termasuk informasi keuangan. Permasalahan tersebut menyiratkan kesulitan prinsipal untuk memverifikasi, memastikan, serta memantau apa yang sebenarnya dilakukan direksi (Eisenhardt, 1989).

### **Perumusan Hipotesis**

#### ***Corporate Social Responsibility***

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*), perusahaan memerlukan pengakuan dari masyarakat atau yang dikenal dengan istilah legitimasi. Legitimasi atau pengakuan yang diberikan menuntut perusahaan untuk melaporkan segala aktivitas yang telah dilakukan perusahaan kepada publik. *Corporate social responsibility* (CSR) adalah aktivitas bertanggung jawab secara sosial yang dapat membangun kepercayaan publik. CSR merujuk pada peran serta perusahaan secara sukarela dalam mewujudkan *sustainable development* (Chouaibi et al., 2022) dan menjadi kewajiban bagi perusahaan setelah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Perusahaan yang berkomitmen tinggi pada CSR akan memiliki kecenderungan menghindari tindakan *tax avoidance* daripada perusahaan berkomitmen CSR yang lebih rendah (Chouaibi et al., 2022). Sehingga ketika perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*, maka dapat terindikasi bahwa perusahaan tidak memiliki praktik tanggung jawab sosial yang baik (Lanis & Richardson, 2013). Berdasarkan argumentasi di atas, peneliti mengajukan hipotesis pertama yaitu:

**H1:** *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### ***Corporate Governance (CG)***

*Corporate governance* berkaitan dengan konflik antara prinsipal dan agen yang timbul dari adanya pemisahan kepemilikan serta kendali dalam perusahaan (Friesse et al., 2008). Prinsipal tidak mempunyai jumlah informasi yang setara tentang aktivitas perusahaan seperti halnya agen. Menurut *agency theory*, *corporate governance* berkaitan dengan pengurangan dampak konflik prinsipal agen dengan membuat sistem yang memungkinkan prinsipal untuk mengendalikan dan memantau direksi (agen) (Friesse et al., 2008). Biaya yang dikeluarkan untuk memantau dan mengendalikan direksi serta biaya yang diderita karena tindakan menyimpang dari kepentingan prinsipal disebut *agency cost* (Friesse et al., 2008). Semakin baik *corporate governance* maka semakin kecil *agency cost* yang

akan dikeluarkan (Daniri, 2014). Hal tersebut dapat terwujud jika perusahaan memiliki *good corporate governance*, sehingga kepercayaan prinsipal terhadap pengelolaan perusahaan oleh agen akan meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan temuan J. Chouaibi et al., (2022) yang memberi bukti bahwa *good corporate governance* dimaksudkan untuk membangun kepercayaan semua pemangku kepentingan dan terkait dengan tingkat transparansi perusahaan. Jika perusahaan memiliki CG yang andal maka akan searah dengan ketaatannya dalam menuntaskan kewajiban pembayaran pajaknya (Sartori, 2008). Artinya, semakin baik CG maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi yang telah dijabarkan, peneliti mengajukan hipotesis kedua yaitu:

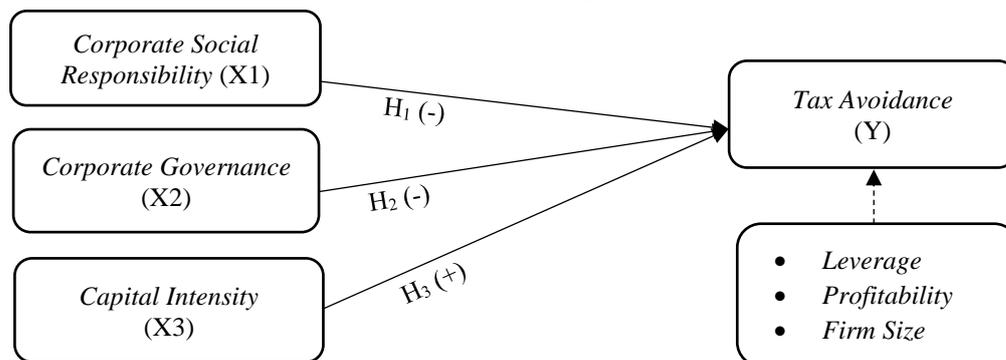
**H2:** *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### Capital Intensity

Biaya penyusutan aset tetap adalah salah satu *deductible expense* yang menjadi pengurang laba bruto perusahaan. Asumsi tersebut didasarkan pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1(b). Berkurangnya laba bruto mengakibatkan berkurangnya laba kena pajak. Hal tersebut berakibat pada rendahnya pajak terutang yang ditanggung oleh perusahaan. Rendahnya pajak terutang perusahaan karena besarnya *capital intensity* mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* (Sonia & Suparmun, 2019). *Capital intensity* adalah bagian dari keputusan keuangan yang dibuat oleh direksi dengan tujuan optimalisasi profit (Mulyani et al., 2014). Prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan termasuk keputusan pengalokasian modal kepada direksi sebagai agen (Frieze et al., 2008). Dalam pendelegasian wewenang inilah muncul masalah ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi antar keduanya. Diasumsikan bahwa direksi memiliki peluang untuk menggunakan wewenangnya sesuai dengan kepentingan pribadi yaitu memaksimalkan laba untuk memperoleh kompensasi (Frieze et al., 2008). Untuk mencapai tujuan tersebut, direksi membuat keputusan alokasi modal berbentuk aset tetap (*capital intensity*). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya semakin besar beban depresiasi sebagai pengurang laba kotor. Sehingga mengecilnya laba kotor diharapkan dapat meminimalkan beban perpajakan yang ditanggung perusahaan. Berdasarkan argumentasi di atas, peneliti mengajukan hipotesis ketiga yaitu:

**H3:** *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

### Desain Sampel dan Data Yang Dikumpulkan

Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berturut-turut dari 2017-2021;
2. Perusahaan manufaktur yang mengungkapkan skor ESG (*environment, social, and governance*) pada database bloomberg dari 2017-2021;
3. Perusahaan manufaktur yang mengungkapkan laporan tahunan (*annual report*) dan data keuangan secara lengkap dari 2017-2021;
4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode pelaporan 2017-2021.

### Metode Analisis

Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dalam penelitian ini *tax avoidance* digambarkan sebagai variabel dependen. Sedangkan CSR, *corporate governance*, dan *capital intensity* digambarkan sebagai variabel independen. Serta *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

$$TAX\_AVOID = \beta_0 + \beta_1(CSR) + \beta_2(GOV) + \beta_3(CAPINT) + \beta_4(LEV) + \beta_5(PROFIT) + \beta_6(SIZE) + \varepsilon$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

1.  $\beta_0$  = Koefisien kendala regresi panel
2.  $\beta_{1-3}$  = Koefisien variabel independen
3.  $\beta_{4-6}$  = Koefisien variabel kontrol
4.  $\varepsilon$  = Kesalahan acak

**Tabel 1 Variabel dan Pengukuran**

Variabel	Pengukuran
TAX_AVOID ( <i>Tax Avoidance</i> )	Beban Pajak/Laba Sebelum Pajak
CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )	<i>Environment Score</i> + <i>Social Score</i>
GOV ( <i>Corporate Governance</i> )	<i>Governance Score</i>
CAPINT ( <i>Capital Intensity</i> )	Total Aset Tetap/Total Aset
LEV ( <i>Leverage</i> )	Total Utang/Total Aset
PROFIT ( <i>Profitability</i> )	Laba Sebelum Pajak/Total Aset
SIZE ( <i>Firm Size</i> )	$\ln \Sigma$ Total Aset

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, *corporate governance*, dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif.

**Tabel 2 Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX_AVOID	85	0,02031	0,43361	0,2412968	0,07459853
CSR	85	10,64090	104,21680	50,8005282	28,16095120
GOV	85	58,39860	89,85550	74,1937871	7,16046518
CAPINT	85	0,09355	0,66424	0,3545861	0,13136539
LEV	85	0,14165	0,66062	0,4154857	0,14349017
PROFIT	85	0,00881	0,23261	0,0956503	0,05013271
SIZE	85	28,80585	32,82039	30,9883007	1,09672588
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Output IBM SPSS 25, 2023

Menurut data diatas, *tax avoidance* (TAX\_AVOID) dengan proksi ETR (*effective tax rate*) memiliki nilai *mean* sebesar 0,24. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persentase pembayaran pajak pada perusahaan manufaktur sebesar 24%. Besaran pajak tersebut berarti rata-rata perusahaan manufaktur tergolong melakukan *tax avoidance* jika dilihat berdasarkan tarif pajak yang seharusnya diterapkan yaitu 25% berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.

Dari deskriptif statistik yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa nilai *mean* CSR sebesar 50,8 dengan nilai minimum 10,64 dan nilai maksimum 104,21. Sehubungan dengan tata kelola (GOV) yang diproksikan menggunakan skor *governance*, didapatkan *mean* 74,193 dengan nilai terendah 58,398, nilai tertinggi 89,855, serta std. deviasi GOV 0,131. Sedangkan nilai rata-rata *corporate governance* yang tinggi mengartikan bahwa perusahaan manufaktur yang dijadikan

sampel memiliki CG yang baik. Pada variabel *capital intensity* (CAPINT) diperoleh *mean* 0,354 dengan data terkecil 0,093, data terbesar 0,664, serta standar deviasi CAPINT sebesar 0,131. Angka yang tinggi pada *capital intensity* menggambarkan bahwa 64% dari total aset yang dimiliki PT Semen Indonesia Tbk berbentuk aset tetap.

**Analisis Uji Asumsi Klasik**

Berdasarkan analisa grafik histogram dan grafik normal p-p plot, data penelitian dinyatakan normal. Temuan tersebut diperkuat dengan pengujian statistik nonparametrik *Kolmogorov Smirnov* yang menunjukkan angka sebesar 0,20 memenuhi asumsi normalitas yaitu lebih dari 0,05 sehingga data dapat dinyatakan normal.

Untuk memastikan tidak adanya masalah multikolinearitas pada data, peneliti menilai *Variance Inflation Factor* (VIF) serta nilai *tolerance*. Seperti hasil pengujian, tiap-tiap variabel memiliki nilai VIF yang tidak melebihi nilai maksimum yaitu 10, serta angka *tolerance* yang lebih dari 0,10. Berdasarkan bukti tersebut, peneliti memperoleh simpulan bahwa tidak ada multikolinearitas pada data peneliti.

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji park memperkuat hasil uji *scatterplot* dengan nilai yang lebih akurat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil logaritma natural dari kuadrat residual terhadap variabel independen. Menurut Ghazali (2021), tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi tiap-tiap variabel melebihi angka 0,05. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hasil pengujian sejalan dengan output *scatterplot* yang menyatakan tidak ada indikasi heteroskedastisitas pada data penelitian.

Pembuktian adanya korelasi antar residual, peneliti menggunakan uji *runs test*. Ghazali (2021), berpendapat bahwa autokorelasi tidak terjadi jika angka *Asymp. Sig* tidak kurang dari 0,05. Pada hasil uji, peneliti dapat mengambil simpulan bahwa tidak ada indikasi terjadinya autokorelasi pada data penelitian.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil uji tersebut menampilkan angka *adjusted R<sup>2</sup>* 0,21 atau 21%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa 21% variasi *tax avoidance* dijelaskan oleh CSR, *corporate governance*, dan *capital intensity*. Selain itu, angka tersebut juga diperjelas dengan adanya variabel *leverage*, *profitability*, dan *firm size* sebagai variabel kontrol. Sementara sisanya yang bernilai 79% berasal dari aspek lain yang tidak dijabarkan oleh penulis.

**Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,516 <sup>a</sup>	,266	,210	,06631975

a. Predictors: (Constant), SIZE, PROFIT, LEV, CSR, GOV, CAPINT

b. Dependent Variable: TAX\_AVOID

Sumber: Output IBM SPSS 25, 2023

**Uji Statistik F**

Seperti hasil uji yang disajikan, peneliti dapat menarik simpulan bahwa variabel bebas yang terdiri dari CSR, GOV, dan CAPINT terbukti memiliki pengaruh signifikan secara simultan pada variabel terikat yaitu TAX\_AVOID dengan angka 0,000.

**Tabel 4 Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,124	6	,021	4,713	,000 <sup>b</sup>
Residual	,343	78	,004		
Total	,467	84			

a. Dependent Variable: TAX\_AVOID

b. Predictors: (Constant), SIZE, PROFIT, LEV, CSR, GOV, CAPINT

Sumber: Output IBM SPSS 25, 2023

### Analisis Regresi

Dari hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa CSR mempunyai koefisien  $-0,001$  artinya variabel CSR memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan juga menunjukkan angka signifikansi CSR  $0,004$  yang tidak lebih dari  $0,05$  mengindikasikan CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara GOV diketahui memiliki koefisien  $-0,002$  yang berarti variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. GOV memiliki angka signifikansi  $0,045$  yang lebih kecil daripada  $\alpha$  yang ditetapkan sehingga faktor *corporate governance* memiliki signifikansi negatif pada *tax avoidance*. Pada variabel *capital intensity*, angka koefisien bertanda positif  $0,031$  yang diartikan CAPINT berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Angka signifikansi CAPINT  $0,654$ , yang melebihi angka maksimum yang ditetapkan yaitu  $0,05$ . Artinya *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Sedangkan variabel *leverage* sebagai variabel kontrol berkoefisien  $-0,013$ , yang berarti *leverage* memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sedangkan variabel *profitability* berkoefisien  $0,004$  diartikan bahwa pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* memiliki arah positif. Masing-masing nilai signifikansi LEV dan PROFIT dengan angka  $0,822$  dan  $0,982$  mengartikan bahwa keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan menunjukkan variabel *firm size* mempunyai nilai koefisien  $0,018$  yang berarti SIZE memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan angka signifikansi SIZE yang sebesar  $0,009$  dan jauh dibawah  $0,05$  diartikan bahwa komponen ini berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

Tabel 5 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,102	,219		-,465	,643
CSR	-,001	,000	-,342	-3,008	,004
GOV	-,002	,001	-,224	-2,041	,045
CAPINT	,031	,068	,054	,449	,654
LEV	-,013	,057	-,025	-,226	,822
PROFIT	,004	,175	,003	,023	,982
SIZE	,018	,007	,264	2,674	,009

a. Dependent Variable: TAX\_AVOID

Sumber: Output IBM SPSS 25, 2023

### Diskusi Hasil

Hipotesis pertama mengharapkan hubungan negatif antara CSR dan *tax avoidance*. Output yang dihasilkan mendukung hipotesis tersebut dan terbukti dalam temuan bahwa hubungan antara keduanya adalah negatif signifikan. Hasil ini sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan J. Chouaibi et al., (2022), Lanis & Richardson (2012), Hoi et al., (2013), dan Yoon et al., (2021). Mereka memperoleh hasil bahwasanya hubungan antara CSR dan *tax avoidance* adalah negatif. Artinya, semakin baik kinerja CSRnya maka indikasi adanya *tax avoidance* perusahaan akan lebih kecil. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwasanya perusahaan dengan tingkat CSR tinggi cenderung mempunyai tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen CSR yang tinggi mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hubungan ini sejalan dengan studi terdahulu yang menemukan bukti bahwa perusahaan tidak memandang CSR sebagai bagian dari *tax avoidance*. Sebaliknya, perusahaan melakukan CSR untuk mempertahankan citra positif perusahaan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa pernyataan ini didukung oleh teori legitimasi yang mengatakan perusahaan harus melaksanakan seluruh kegiatannya dengan berdasar pada batasan aturan, norma, serta nilai yang diterima oleh sosial masyarakat dalam rangka mempertahankan

kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, simpulan yang dapat diperoleh adalah hipotesis pertama **(H1) diterima**.

Hipotesis kedua memprediksi hubungan negatif antara *corporate governance* (CG) dan *tax avoidance*. Output pengujian mendukung hipotesis karena ditemukan bahwa hubungan antara keduanya negatif signifikan. Output yang didapatkan sejalan dengan penjabaran J. Chouaibi et al., (2022), Zeng (2019), dan Salhi et al., (2020) yang memperoleh temuan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin terstruktur CG, maka kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan semakin lemah. Hal tersebut didasarkan pada penemuan penelitian terdahulu bahwa perusahaan yang memiliki CG yang baik akan sejalan dengan pemenuhan kewajiban pajaknya sebagai cerminan kepatuhan institusi. Selain itu, jika CG di dalam perusahaan dikategorikan baik, potensi asimetri informasi antara prinsipal dan agen akan menurun, *agency cost* menjadi lebih rendah, serta pengungkapan informasi akan lebih tinggi. Dengan temuan tersebut, maka penelitian ini benar adanya didukung oleh teori agensi yang mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah keagenan yang timbul (tindakan kontraproduktif), diperlukan adanya penerapan CG yang baik sehingga prinsipal yakin bahwa agen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan dan harapan prinsipal dalam hal ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, simpulan yang dapat diperoleh adalah hipotesis kedua **(H2) diterima**.

Hipotesis terakhir mengharapkan adanya pengaruh positif antara *capital intensity* (intensitas modal) dan *tax avoidance*. Hipotesis ini didukung oleh output pengujian yang menemukan hubungan antara keduanya adalah benar positif. Namun, ditemukan bahwa pengaruh *capital intensity* tidaklah signifikan pada *tax avoidance* karena angka menunjukkan 0,654 yang jauh di atas nilai alpha 0,5. Jika hanya melihat arah hubungan maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan melakukan *capital intensity* untuk menghindari pajak, namun jika diperhatikan nilai signifikansinya maka pengaruhnya tidak signifikan. Artinya, besar kecilnya modal perusahaan berbentuk aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya potensi *tax avoidance* yang akan dilakukan. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan manufaktur memang banyak melakukan alokasi modal dalam bentuk aset tetap (*capital intensity*), namun tidak bermaksud untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Sebaliknya, perusahaan manufaktur memang membutuhkan banyak aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan sejenisnya demi mempertahankan atau memperluas kegiatan operasionalnya. Keputusan keuangan dalam melakukan *capital intensity* yang diambil oleh direksi ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh kompensasi, sehingga hasil yang diperoleh tidak mendukung teori agensi. Hasil pengujian ini sama dengan studi yang dilakukan Sonia & Suparmun (2019) yang membuktikan bahwasanya *capital intensity* tidak berhubungan dengan tindakan *tax avoidance*. Oleh sebab itu, simpulan yang dapat diperoleh adalah hipotesis ketiga **(H3) ditolak**.

## KESIMPULAN

Studi ini dirancang dengan tujuan membuktikan adanya hubungan *corporate social responsibility* (CSR), *corporate governance* (CG), dan karakteristik perusahaan dengan *tax avoidance*. Penelitian dilakukan menggunakan sektor manufaktur sebagai populasi dengan 85 sampel selama tahun 2017 hingga 2021. Dari data yang dikumpulkan, rata-rata perusahaan manufaktur tergolong menghindari pajak dengan nilai ETR (*effective tax rate*) 24% yaitu di bawah tarif pajak yang berlaku sebesar 25% berdasarkan UU No. 36 tahun 2008. Berdasarkan teori legitimasi, ditemukan bahwa kinerja CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan peneliti memberikan bukti bahwa perusahaan manufaktur perlu mengungkapkan kinerja CSR nya demi menjaga citra dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk kelangsungan bisnisnya, bukan sebagai manajemen risiko akibat tindakan *tax avoidance*. Menurut teori agensi, *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut memberikan bukti bahwa sektor manufaktur yang mempunyai tata kelola yang andal terindikasi tidak melakukan *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan teori agensi, *capital intensity* tidak berpengaruh pada praktik *tax avoidance*. Temuan tersebut membuktikan bahwa sektor manufaktur mengalokasikan modal berbentuk aktiva tetap dengan maksud mempertahankan atau memperluas kegiatan operasionalnya. Keputusan keuangan dalam melakukan *capital intensity* yang diputuskan oleh direksi tidak dimaksudkan untuk memperoleh kompensasi dan tidak pula memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan.



Meskipun penelitian dilakukan seketat mungkin, tetap ada beberapa kekurangan penelitian. Keterbatasan atau kekurangan ini membuka perspektif baru untuk peneliti selanjutnya. Sampel yang dipakai dalam studi ini belum sepenuhnya menggambarkan sektor manufaktur. Hal tersebut didasarkan pada kuantitas perusahaan manufaktur yang mengungkapkan skor ESG pada database bloomberg masih sedikit. Oleh sebab itu, sampel akhir yang layak dimasukkan dalam penelitian hanya sebesar 12% dari keseluruhan sektor manufaktur. Selain itu, nilai *adjusted R*<sup>2</sup> hanya berkisar 21%. Temuan tersebut membuktikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang memiliki hubungan serta memengaruhi *tax avoidance* di luar model yang diajukan peneliti. Sehingga disarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan sumber lain selain database bloomberg untuk mendapatkan skor ESG agar didapatkan sampel yang lebih banyak dan dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel lain yang diduga berpengaruh pada *tax avoidance* sehingga dapat meningkatkan nilai *adjusted R*<sup>2</sup>.

## REFERENSI

- Abdelmoula, L., Chouaibi, S., & Chouaibi, J. (2022). The effect of business ethics and governance score on tax avoidance: a European perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 576–597. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0219>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Daniri, M. A. (2014). *LEAD BY GCG* (Pertama). Gagasan Bisnis Indonesia.
- Deasvery Falbo, T., Firmansyah, A., & Keuangan Negara STAN, P. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. In *Indonesian Journal of Accounting and Governance* (Vol. 2, Issue 1).
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. In *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 15, Issue 3, pp. 312–343). <https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review* (Vol. 14, Issue 1). Academy of Management Review.
- Friese, A., Link, S., & Mayer, S. (2008). *Taxation and Corporate Governance-The State of the Art*.
- Ghozali, I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN IBM SPSS 26. 10*.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). *TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK*. 6(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Hidayati, N. N., & Murni, S. (2009). *PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP EARNINGSS RESPONSE COEFFICIENT PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE* (Vol. 11, Issue 1).
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *Accounting Review*, 88(6), 2025–2059. <https://doi.org/10.2308/accr-50544>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). *INDONESIAN TREASURY REVIEW FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RASIO BEBAN PAJAK PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS SEKTOR MANUFAKTUR DI INDONESIA*.



- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mulyani, S., Darminto, & M.G WI ENDANG N.P. (2014). *PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK TAHUN 2008-2012)*.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (4th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salhi, B., Riquen, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2020). The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law. *Social Responsibility Journal*, 16(8), 1149–1168. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2019-0125>
- Sartori, N. (2008). *EFFECTS OF STRATEGIC TAX BEHAVIORS ON CORPORATE GOVERNANCE*. <http://ssrn.com/abstract=1358930> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1358930>
- Septiani, A., & Muid, D. (2019). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(4), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). *Factors Influencing Tax Avoidance*.
- Yoon, B. H., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The effect of esg performance on tax avoidance—evidence from korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/su13126729>
- Zeng, T. (2019). Country-level governance, accounting standards, and tax avoidance: a cross-country study. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 401–424. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179>